

VALUASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI PASAMAN BARAT

Gusmiyati^{1b}, Rahmadani Yusran¹

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
gusmiyati60037@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the evaluation of the policy to eradicate malnutrition in West Pasaman. This study focused on the subject of discussion, namely the impact of implementing policies on stunting prevention in West Pasaman Regency. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Research informants were determined by purposive sampling. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation as well as data reduction, data display and data verification so that accurate conclusions can be drawn from the data that has been obtained. The results of the research conducted indicate that the impact of implementing policies on stunting prevention in West Pasaman Regency can be analyzed as not having a significant impact on stunting alleviation and prevention.

Keywords: *evaluation, public policy, stunting, West Pasaman Regency*

Abstrak

Artikel ini memiliki tujuan untuk Menganalisis Evaluasi Kebijakan Stunting di Pasaman Barat. Penelitian ini difokuskan pada pokok pembahasan yaitu dampak pelaksanaan kebijakan terhadap pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dilakukan reduksi data, display data dan verifikasi data agar bisa ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah diperoleh. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dampak pelaksanaan kebijakan terhadap pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat dapat dianalisis bahwa masih belum berdampak secara signifikan terhadap pengentasan dan pencegahan stunting.

Kata kunci: **evaluasi, kebijakan publik, stunting, Kabupaten Pasaman Barat.**

Pendahuluan

Dalam rangka pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia, pemerintah telah berupaya keras dengan mengeluarkan kebijakan dan regulasi serta melalui sejumlah intervensi. Adapun kebijakan/ regulasi tersebut, diantaranya yaitu Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015. Meskipun telah dibuat berbagai kebijakan dan regulasi untuk menurunkan angka stunting, namun pada kenyataannya angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Hasil Riskesdas menunjukkan bahwa masalah stunting yang terjadi relatif



tetap sekitar 36.8% tahun 2007 dan mencapai 37,2 % tahun 2013, Sementara tahun 2018 menurun 6,4% menjadi 30,8%(Budiastuti & Rahfiludin, 2019). Meskipun di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,4%, tetapi presentasi secara keseluruhan masih dikatakan tinggi. Misalnya di Kabupaten Blora, kebijakan intervensi gizi sensitif penurunan stunting belum terlaksana dengan optimal dikarenakan setiap upaya peningkatan perbaikan gizi terdapat program yang belum berjalan maksimal sehingga belum dapat memberikan dampak yang maksimal pada penurunan stunting (Probohastuti, Rengga, & Si, 2019).

Di Sumatera Barat, pencegahan dan penurunan stunting telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016- 2021 dengan misi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Beriman, Berkarakter Dan Berkualitas Tinggi. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang demikian Pemerintah Daerah Sumatera Barat memfokuskan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Gizi Dengan Fokus Utama Pada 1000 Hari Kehidupan Manusia. Meskipun penangan masalah gizi sudah tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat, pada kenyataannya angka prevalensi stunting (gizi buruk) di Sumatera Barat masih cukup tinggi yaitu padatahun 2015-2017 mencapai 19,4%, 18,9%, dan 21,3%.

Di Pasaman Barat jumlah stunting masih cukup tinggi, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Pasaman Barat tahun pada 2018-2020 terdapat 11 Kecamatan dengan angka stunting yang perkembangannya naik dan turun. Pada tahun 2018, Kecamatan dengan stunting tertinggi yaitu Lembah Melintang yakni sebesar 32,9%. Sedangkan untuk kecamatan yang mengalami peningkatan prevalensi pada tahun 2020 adalah Kecamatan Koto Balingka dengan angka 27,9% dan Sungai Beremas dengan angka 28,6%.

Berdasarkan temuan Anggaraini & Rusdy (2020) di wilayah kerja Puskesmas Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat angka stunting masih tinggi, hal ini berhubungan dengan sanitasi lingkungan. Misalnya dalam hal fasilitas rumah tangga seperti kurangnya ketersediaan air bersih, lingkungan yang kurang bersih dan juga kurangnya persediaan jamban dapat beresiko menimbulkan kejadian stunting. Fenomena ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya tingginya jumlah gizi buruk (stunting) disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pola hidup dan pola makan Ibu, misalnya sejak bayi didalam kandungan pola hidup dan pola makan ibu tidak dilakukan secara sehat, seperti jarang olahraga dan memakan makanan yang tidak bergizi.

Sesuai Permenkes No. 23 Tahun 2014, upaya perbaikan gizi dilakukan berdasarkan; 1) Setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan gizi; 2) Setiap orang terutama kelompok rawan gizi memiliki akses terhadap pangan yang bergizi, dan; 3) Setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan. Sedangkan tujuannya adalah Pertama, perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang; Kedua, Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; Ketiga, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dan; Keempat, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Namun pada kenyataannya tujuan tersebut belum tercapai dikarenakan; Pertama, upaya perbaikan gizi melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang belum tercapai, Kedua, upaya perbaikan gizi melalui perbaikan perilaku sadar



gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan belum tercapai, Salahsatu indikator keluarga sadar gizi yaitu balita dan ibu nifas dianjurkan untuk meminum suplemen gizi sesuai anjuran (<http://sister.pasamanbaratkab.go.id> 2020). Ketiga, upaya perbaikan gizi melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi belum terwujud, hal ini dikarenakan masyarakat belum mendapatkan pelayanan mengenai stunting karena akses pelayanan kesehatan dari petugas kesehatan ke nagari yang memiliki prevalensi stunting tersebut cukup sulit dikarenakan daerah tersebut memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau. Keempat, upaya perbaikan gizi melalui peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi masih belum optimal. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi dilakukan sebagai upaya penyediaan data serta informasi mengenai kondisi pangan dan gizi secara rutin yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Di Kabupaten Pasaman Barat sendiri sudah meluncurkan peta ketahanan pangan dan kerentanan dan kerentanan pangan di tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berupaya akan mewujudkan Nagari Mandiri Pangan dengan tujuan nagari yang ada di Pasaman Barat dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal itu dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri,

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini mendeskripsikan, menggambarkan suatu fenomena atau permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan. Denzim dan Lincoln dalam (Moleong, 2006) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, yang bertujuan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif ini berupaya untuk menggambarkan suatu gejala sosial yang terjadi pada masyarakat. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yang terkait Dampak Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Pencegahan Stunting adalah di Kabupaten Pasaman Barat. Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Informan dipilih dan dipertimbangkan yang benar-benar paham dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun informan penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi dan menggunakan bahan referensi yang jelas. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis melalui tahap reduksi data, display data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan dengan penegasan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis dari Dampak Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Pencegahan Stunting di kabupaten pasaman barat dijelaskan sebagai berikut: Secara teoritis, evaluasi kebijakan berkaitan erat dengan dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Karena setiap kebijakan akan selalu menghasilkan suatu dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan, baik

yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Sebuah evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan, melihat sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Brigdman & Davis (dalam Badjuri and Yuwono 2002) menjelaskan bahwa pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok, yaitu: (1) indikator input, (2) indikator process, (3) indikator output (4) indikator outcomes. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Indikator *Input* (masukan)

Mengacu Pada Brigdman & Davis dalam (Badjuri dan Yuwono, 2002), secara teoritis fokus teori ini terletak pada sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. Agar pelaksanaan kebijakan pengentasan gizi buruk di Pasaman Barat mencapai tujuan yang optimal.

Berdasarkan temuan peneliti yang peneliti lakukan selama di lapangan, pertama, untuk sumber daya manusia di tingkat tenaga gizi ini masih kurang. Pasalnya jumlah pegawai tenaga gizi di setiap puskesmas tidak merata, sehingga dalam pemberian informasi gizi dan pendidikan gizi kepada masyarakat belum dapat dikatakan optimal.

Kedua, berdasarkan temuan yang peneliti lakukan dilapangan, anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan pencegahan stunting melalui beberapa upaya yang telah dilakukan memiliki anggaran yang cukup. Untuk infrastruktur (alat, sarana dan prasarana) itu sangat kurang. Karena pada tingkatposyandu di nagari memiliki keterbatasan alat ukur tinggi badan dan beratbadan. Alat-alat ini memiliki tingkat atau spesifikasi yang tidak dikriteriakan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga untuk menentukan anak itu stunting atau tidak, tidak dapat dilakukan menggunakan alat-alat tersebut. Melainkan harus menggunakan alat yang lebih bagus seperti yang berada di Rumah Sakit.

2. Indikator *Process* (proses)

Indikator ini diantaranya meliputi efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

2.1. Efektifitas

Indikator efektivitas terletak pada pencapaian hasil/tujuan. Apakah suatu kebijakan yang dibuat tersebut sudah tercapai. Hasil penemuan peneliti dilapangan belum semua tujuan kebijakan tercapai.

2.2. Efisiensi

Efisiensi dalam kebijakan pencegahan stunting di Pasaman Barat dilihat dari anggaran dan sumberdaya manusia yaitu:

a. anggaran dalam upaya pengentasan stunting di pasaman barat di dapat dari APBD, bantuan dari perusahaan swasta yaitu PT. perkebunan sawit, dan di pada DPPKBP3A terdapat dana pokir.

b. sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting khususnya di bidang tenaga gizi masih kurang. Berdasarkan penemuan yang dilakukan oleh peneliti, bahwasannya di beberapa puskesmas di kecamatan yang memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi tidak memiliki tenaga gizi, yaitu seperti daerah puskesmas desa baru,

silaping, puskesmas 6 koto selatan, puskesmas sasak ranah pasisie tidak ada PNS tenaga gizi.

3. Indikator *Outputs* (keluaran/hasil)

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan dilapangan, bahwa program yang dijalankan oleh Dinas dan OPD terkait dalam pencegahan dan penueenan stunting perlu dilakukan secara lintas sektor. Untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya koordinasi yang dilakukan setiap OPD ada yang sudah baik. Contohnya koordinasi antara Dinas kesehatan Pasaman Barat dengan dinas Ketahanan Pangan yang melakukan pemberian bantuan makanan sembako dengan cara Dinas Kesehatan pemberi data penerima manfaat, sementara itu Dinas Ketahanan Pangan yang menyalurkan bantuan. Meskipun telah dilakukan koordinasi ini masih adanya kekurangan dari faktor dana, sarana dan prasarana.

4. Indikator *Outcomes* (dampak)

Berdasarkan temuan dilapangan. Pertama, untuk akses terhadap informasi gizi dan pelayanan gizi di Pasaman Barat masih kurang optimal karenatenaga gizi yang tidak merata dimiliki oleh puskesmas daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Sehingga hal ini mengakibatkan pada kurangnya pemahaman masyarakat. Kedua, berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan dilapangan akses terhadap pangan yang bergizi belum mampu memberikan dampak penurunan prevalensi stunting secara signifikan. Seharusnya dengan adanya kemudahan akses terhadap pangan yang bergizi dapat mengentaskan atau mencegah kejadian stunting. Namun pada kenyatannya dilapangan akses terhadap pangan yang bergizi diberikan dengan pemberian bantuan makanan dan pemberdayaan terhadap kelompok wanita tani untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai ladang sayur supaya dapat membantu perekonomian dan keluar dari zona kemiskinan. Kenyataannya hal ini belum terwujud karena pemberian bantuan makanan maupun bibit tanaman sayur tidak merata. Ketiga pada temuan dilapangan pelayanan gizi dan kesehatan yang diberikan masih kurang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat karena dalam pemberian pelayanan gizi dan kesehatan belum sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi seperti masih rendahnya kualitas alat-alatyang digunakan pengukuran tinggi badan dan berat badan di posyandu.

Kesimpulan

Dari segi dampak yang dihasilkan dalam kebijakan pencegahan stunting di Pasaman Barat belum berdampak secara signifikan terhadap pencegahan dan penurunan stunting. Hal ini dapat dilihat dari dampak setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan gizi, setiap orang terutama kelompok rawan gizi memiliki akses terhadap pangan yang bergizi, dan; setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan belum mencapai tujuan yang diinginkanberdasarkan Permenkes No. 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. Seharusnya pemerintah mengevaluasi kebijakan dengan memperhatikan aspek penilaian terhadap sumber daya pendukung, efektivitas dan efisiensi dalam metode transformasi dalam sebuah kebijakan, hasil atau produk dan dampak sebuah pelaksanaan sesuai dengan pokok indikator input, proses, output dan outcome yang dijabarkan oleh Bridgman & Davis.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Y., & Rusdy, P. H. . (2020). Faktor Sanitasi Lingkungan Penyebab Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 4 (1).
- Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Jakarta.
- Budiastuti, I., & Rahfiludin, M. Z. (2019). *Faktor Risiko Stunting pada anak di Negara Berkembang*. Universitas Airlangga.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Probohastuti, N. F., Rengga, A. loysius, & Si, M. (2019). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Penurunan Stunting di Kabupaten Blora. *Journal Of Public Policy And Management*, 8 (4).
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Jakarta.